



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BIRO HUKUM SETDAPROVSU**



TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pencapaian kinerja yang dilakukan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu merupakan wujud nyata dari hasil pencapaian visi, misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi (LKIP) Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Biro Hukum Setdaprovsu selama tahun 2024 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk merealisasikan tujuan dan sasaran strategis, serta visi dan misi. Visi tersebut yakni *“Menjadikan Biro Hukum yang terpercaya dalam penyusunan rancangan produk hukum daerah, serta memberikan bantuan perlindungan hukum dan penegakan Hak Azasi Manusia”*. Sejalan dengan visi tersebut, maka Misi Biro Hukum Setdaprovsu adalah: *“Meningkatan perencanaan hukum dan pembinaan Peraturan Perundang-undangan; Meningkatkan perlindungan Hak Azasi Manusia; Meningkatkan penegakan hukum di seluruh lingkungan masyarakat Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara secara tegas, konsisten dan berkeadilan; dan Meningkatkan penggalakan sosialisasi hukum dan informasi hukum, sesuai dengan perkembangan pembangunan di bidang hukum serta pembinaan PNS”*.

Pencapaian kinerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 diukur melalui 3 (tiga) sasaran strategis yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam rewiu dokumen Renstra Biro Hukum Setdaprovsu sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Uraian Program/ Kegiatan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1.	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Kepala Daerah dan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan dan Bantuan Hukum	Meningkatkan Budaya Kepatuhan Hukum ASN dan Masyarakat	1. Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.		PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	
					I. Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan	
				1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	40 Perda/ Pergub
				2. Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	700 produk hukum
				3. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	3. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	450 Perda/ Perkada
			4. Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	4. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	40 produk hukum	
			2. Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.		II. Fasilitasi Bantuan Hukum	
				1. Jumlah penanganan perkara hukum di pengadilan.	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	25 perkara
				2. Jumlah penanganan perlindungan HAM.	2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	15 kasus

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 berhasil disusun dan diterbitkan. Laporan ini memuat informasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dalam mencapai tujuan serta sasaran strategisnya. Laporan tersebut juga mencakup Indikator Kinerja Utama yang menunjukkan target dan realisasi selama tahun 2024.

Penyusunan LKIP didasarkan pada regulasi yang mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government). Dengan demikian, LKIP ini menjadi bukti tanggung jawab Biro Hukum dalam menjawab amanah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Laporan ini juga merepresentasikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tahun 2024, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Biro Hukum berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024–2026. Penyusunan laporan ini merujuk pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas, laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, wujud transparansi, serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Selain itu, laporan ini berperan sebagai alat kontrol dan pemicu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi di lingkungan Biro Hukum. Kinerja Biro Umum dinilai berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), yang menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Melalui analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan dalam Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, diharapkan terjadi peningkatan optimalisasi peran kelembagaan serta efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Biro Umum. Hal ini bertujuan untuk mendukung pencapaian kinerja secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) di masa mendatang.

Medan, Maret 2025

Kepala Biro Hukum Setdaprovsu,



APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196904211990032003

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vli
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi.....	2
1.2.1 Struktur Organsasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	5
1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	6
1.4 Dasar Hukum	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
3.1 Capaian Kinerja	16
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun – pelaporan	17
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian – kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun – terakhir	19
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam – dokumen perencanaan strategis organisasi	19
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	21

3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau – peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi – yang telah dilakukan	22
3.1.6	Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	23
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	25
3.2	Realisasi Anggaran	27
BAB IV	PENUTUP	31
4.1	Kesimpulan	31
4.2	Saran	31

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	5
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah – Tahun Periode Rencana Strategis.....	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024	10
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024	11
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah.....	13
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	14
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024	17
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja.....	19
Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis.....	20
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kab/Kota...	21
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi.....	22
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	23
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	25
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	5
-------------------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era demokrasi modern di Indonesia dewasa ini, salah satu isu yang mengemuka adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi dipandang penting sebab sudah terlalu lama birokrasi pemerintah Indonesia terjebak dalam krisis multidimensi yang berkepanjangan. Birokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelum era reformasi telah membangun budaya birokrasi yang kental dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang profesional dan akuntabel. Kinerja birokrasi menjadi isu kebijakan sentral yang semakin strategis karena perbaikan kinerja birokrasi memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Reformasi sektor publik ini mengacu pada karakteristik tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Paradigma baru ini menekankan pada peranan manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong meningkatkan ekonomi manajerial, transparansi, akuntabilitas publik dan diciptakan pengelolaan manajerial yang bersih bebas dari korupsi. Berangkat dari ide tersebut, untuk menghindari segala bentuk penyelewengan yang dapat terjadi dalam birokrasi pemerintahan, setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Kinerja Tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa suatu evaluasi atau reviu laporan kinerja yang disusun dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diperlukan sebagai alat ukur untuk mengetahui sejauhmana kinerja Kementerian/ Lembaga/

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pencapaian visi dan misi serta tujuannya.

Dalam hal ini Biro Hukum Setdaprovsu sebagai unit SKPD juga berkewajiban melakukan pelaporan atas pencapaian kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi, dalam merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta berfungsi pula sebagai media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Hukum Setdaprovsu di masa mendatang.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara:

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, pada Bab III Sekretariat Daerah, Bagian Ketiga, Pasal 6, Susunan Organisasi Biro Hukum Setdaprovsu dipimpin oleh Kepala Biro dengan membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian dan 1 (satu) Kasubbag dan 1 (satu) Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota;
- c. Bagian Bantuan Hukum;
- d. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Biro Hukum adalah unsur staf yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, pada Bab II, Sekretariat

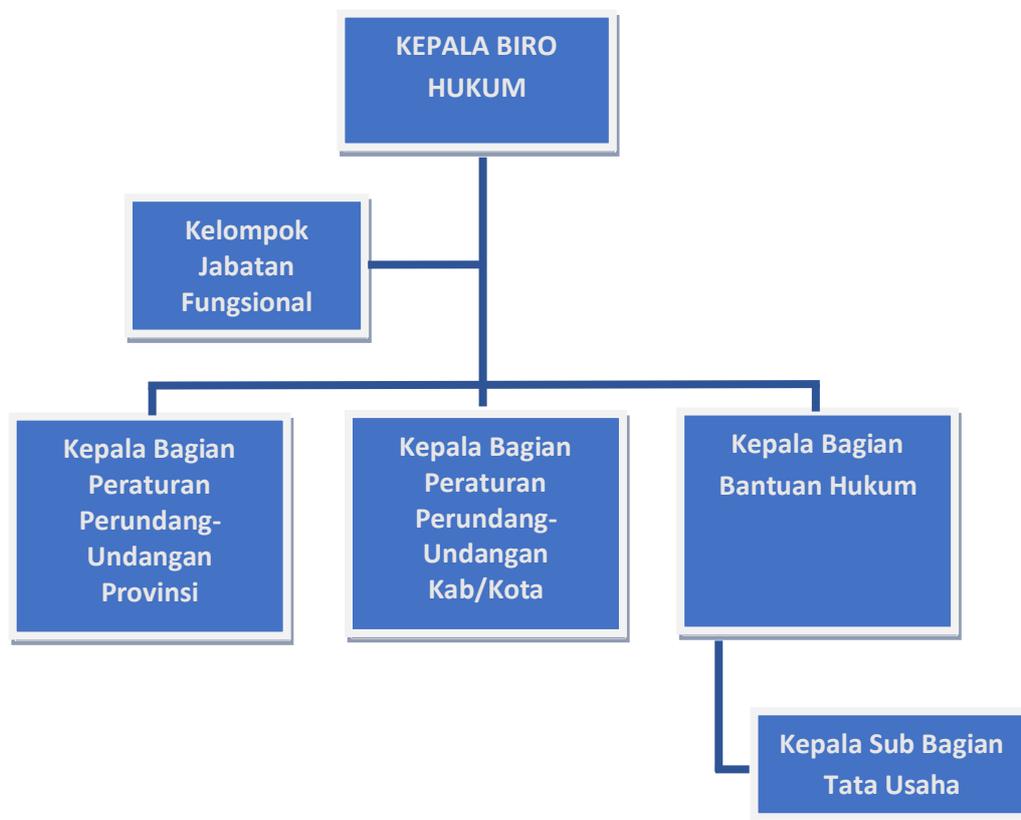
Daerah, Bagian Keenam, Pasal 11, Biro Hukum mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Biro Hukum mempunyai tugas pelaksanaan program pembentukan peraturan daerah, perumusan, penyusunan, pembahasan, dan pengundangan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, evaluasi dan fasilitasi pembentukan produk hukum kabupaten/kota, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, kajian hukum, serta pemajuan hak asasi manusia, yang dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan bahan perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah;
 - b. pengolahan dan penyajian bahan produk hukum daerah;
 - c. perumusan kebijakan penyusunan produk hukum daerah, serta evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
 - d. penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
 - e. perumusan rancangan produk hukum daerah;
 - f. pembahasan rancangan produk hukum daerah;
 - g. pengurusan proses evaluasi, fasilitasi, klarifikasi dan verifikasi rancangan produk hukum daerah;
 - h. pelaksanaan proses permohonan nomor register, penetapan dan pengundangan produk hukum daerah;
 - i. pendokumentasian dan penyebarluasan produk hukum daerah serta pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - j. penerimaan, pencatatan dan pembukuan usul evaluasi dan fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota;
 - k. pengkajian rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
 - l. pemberian rekomendasi sesuai dengan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
 - m. penyiapan dan penyelesaian proses penetapan hasil evaluasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;

- n. penyelesaian surat rekomendasi sesuai hasil fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- o. pemberian nomor register rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan hasil evaluasi dan fasilitasi rancangan produk hukum Kabupaten/Kota;
- q. penerimaan permohonan dan/atau perintah bantuan hukum;
- r. pelaksanaan identifikasi permasalahan hukum;
- s. penyusunan langkah-langkah penanganan permasalahan hukum;
- t. penyiapan bahan persidangan penanganan perkara;
- u. penanganan proses pemeriksaan perkara di pengadilan;
- v. pengajuan upaya hukum;
- w. permohonan pelaksanaan putusan;
- x. pelaksanaan penanganan sengketa di luar pengadilan;
- y. penyiapan penyusunan bahan telaahan dan pertimbangan hukum;
- z. penyiapan bahan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin;
- aa. pelaksanaan pemajuan hak asasi manusia;
- bb. penyelenggaraan administrasi Biro Hukum;
- cc. pengelolaan kepegawaian Biro Hukum;
- dd. pengelolaan keuangan Biro Hukum;
- ee. pengelolaan barang/aset Biro Hukum; dan
- ff. penyusunan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Biro Hukum Sekretariat Daerah. Berikut bagan struktur organisasi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara:

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara



Sumber : Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	Tahun 2023	Rp. 6.124.000.000,-
APBD	Tahun 2024	Rp. 5.784.304.714,-

Sumber : Biro Hukum SetdaprovSU

1.3 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Adapun permasalahan dan Isu Strategis yang ada di Biro Hukum SetdaprovSU, antara lain:

- a. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan di dalam dan di luar provinsi, karena kegiatan Biro Hukum terkait penyusunan Ranperda tergantung jadwal kunjungan kerja DPRD, dan untuk penanganan perkara tergantung jadwal persidangan perkara.
- b. Keterlambatan pencairan Ganti Uang Persediaan dikarenakan prosedur dalam pencairan Ganti Uang Persediaan harus melalui Sekretariat Daerah sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama;
- c. Kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Biro Hukum SetdaprovSU, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya.

Salah satu isu strategis dalam tata pemerintahan ialah aktualisasi Good Governance dan Clean Government. Penerapan Good Governance (tata pemerintahan yang bersih), tidak dapat dilepaskan dari peran-peran pemerintah, peran masyarakat sipil, dan peran swasta. Dengan demikian maka penerapan Good Governance dan Clean Government tidak dapat dilepaskan dari SDM pemerintah yang berarti kesadaran, kemauan, dan kemampuan para pelaksana akan memberikan pengaruh terhadap penerapan Good Governance dan Clean Government.

1.4 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
- f. Surat Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 000.8.6.3/810/2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Perjanjian Kinerja (PK).

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Terciptanya Kepastian Hukum Atas Produk Hukum Daerah dan Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum kepada ASN dan Masyarakat serta Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah
Tahun Periode Rencana Strategis

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terciptanya Kepastian Hukum Atas Produk Hukum Daerah dan Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum kepada ASN dan Masyarakat serta Perlindungan HAM	1. Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1. Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.	1. Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	40 Perda/ Pergub	40 Perda/ Pergub	40 Perda/ Pergub	45 Perda/ Pergub	50 Perda/ Pergub
				2. Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	455 Perda/ Perkada	460 Perda/ Perkada
				3. Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	700 Produk Hukum	700 Produk Hukum	700 Produk Hukum	705 Produk Hukum	710 Produk Hukum

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Target Kinerja Pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan	Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	40 Produk Hukum	40 Produk Hukum	40 Produk Hukum	45 Produk Hukum	50 Produk Hukum
		2. Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	1. Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.	Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	25 Perkara	25 Perkara	25 Perkara	30 Perkara	35 Perkara
			2. Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM.	Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	23 Kegiatan	23 Kegiatan	23 Kegiatan	28 Kegiatan	33 Kegiatan

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	3	4	5	6	7	8
1	Terciptanya Kepastian Hukum Atas Produk Hukum Daerah dan Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum kepada ASN dan Masyarakat serta Perlindungan HAM	1. Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1. Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.	Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	$\frac{\text{Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah difasilitasi oleh Kemendagri}}{\text{Jumlah Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi}} \times 100\%$	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi
				Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	$\frac{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang telah dievaluasi dan difasilitasi}}{\text{Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang telah dimohon untuk evaluasi dan fasilitasi}} \times 100\%$	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota
				Rancangan Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	$\frac{\text{Jumlah Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang telah dieksaminasi}}{\text{Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur dan Naskah Hukum Lainnya yang diusulkan}} \times 100\%$	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi
				Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan	$\frac{\text{Jumlah Pergub dan Perda yang diinformasikan}}{\text{Jumlah Pergub dan Perda yang telah ditetapkan}} \times 100\%$	Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	3	4	5	6	7	8
				kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum SetdaprovSU.		
		2. Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan PemrovSU dan Masyarakat.	1. Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.	Penanganan Perkara PemrovSU di Pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang ditangani}}{\text{Jumlah perkara yang masuk}} \times 100\%$	Bagian Bantuan Hukum
			2. Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM	Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan.	$\frac{\text{Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM dan Kegiatan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM yang direncanakan}} \times 100\%$	Bagian Bantuan Hukum

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024:

Tabel 2.3

Rencana Kinerja Tahun 2024

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Satuan	Target
1	2	3	4	5	6	7
1	Terciptanya Kepastian Hukum Atas Produk Hukum Daerah dan Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum kepada ASN dan Masyarakat serta Perlindungan HAM	1. Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1. Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.	1. Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	Perda/ Pergub	40
				2. Rancangan Peraturan	Perda/	450

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Defenisi Operasional	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	6	7	
				Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	Perkada		
				3. Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	Produk Hukum	700	
			2. Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan	Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	Produk Hukum	40	
			2. Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	1. Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.	Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	Perkara	25
				2. Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM.	Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	Kegiatan	23

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	40 Perda/ Pergub
		2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada
		3. Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	700 produk hukum
		4. Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	40 produk hukum
2.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	1. Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	25 perkara
		2. Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	15 kasus

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara:

Tabel 2.5
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan SKPD	15 dokumen
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55 orang
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	220 orang
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor	48 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/Fotocopy	21000 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	100 laporan
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman surat/paket	550 laporan
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26 unit

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum	6 orang
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki	110 unit
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		100%
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam & di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun.	80 dokumen
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	750 dokumen
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi & Informasi Kab/Kota yang terintegrasi	20 dokumen
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	600 dokumen
2	Fasilitasi Bantuan Hukum		100%
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan & Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi	35 kasus
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM & Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi	40 kasus

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian	Sumber Data
1.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	40 Perda/ Pergub	43 Perda/ Pergub	107,5%	Bagian PUU Provinsi
		2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3%	Bagian PUU Kab/Kota
		3. Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8%	Bagian PUU Provinsi
		4. Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5%	Bagian PUU Provinsi
2.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	1. Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	25 perkara	38 perkara	152%	Bagian Bantuan Hukum
		2. Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	15 kasus/ masalah	23 kasus/ masalah	153,3%	Bagian Bantuan Hukum

Uraian penjelasan tabel:

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis yaitu Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah, dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu: 1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi, target 40 Perda/Pergub

realisasi 43 Perda/Pergub dan capaian 107,5%, 2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi, target 450 Perda/Perkada realisasi 528 Perda/Perkada dan capaian 117,3%, 3. Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi, target 700 produk hukum realisasi 909 produk hukum dan capaian 129,8%, dan 4. Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum SetdaprovSU, target 40 Perda/Pergub realisasi 43 Perda/Pergub dan capaian 107,5%.

Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan PemrovSU dan Masyarakat dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yaitu: 1. Jumlah Penanganan Perkara PemrovSU di Pengadilan, target 25 perkara realisasi 38 perkara dan capaian 152%, dan 2. Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat, target 15 kasus/masalah realisasi 23 kasus/masalah dan capaian 153,3%.

3.1.2 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022	2023	2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	60 produk hukum	65 produk hukum	40 Perda/ Pergub	43 Perda/ Pergub	107,5%
		2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Ranperda Kab/Kota	850 Ranperda Kab/Kota	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	117,3%
		3. Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama,	800 produk hukum	850 produk hukum	700 produk hukum	909 produk hukum	129,8%

		Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.					
		4. Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	30 produk hukum	30 produk hukum	40 produk hukum	43 produk hukum	107,5%
2.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	5. Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	31 perkara	31 perkara	25 perkara	38 perkara	152%
		6. Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	14 kasus	14 kasus	15 kasus	23 kasus	153,3%

Uraian penjelasan tabel :

Perbandingan Capaian Kinerja Biro Hukum Setdaprovsu pada sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah memiliki realisasi dan capaian yang stabil untuk tahun 2023 dan 2024. Sedangkan pada sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat mengalami peningkatan.

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Biro Hukum Setdaprovsu periode 2019-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2024	2024 Target Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
1.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	43 Perda/ Pergub	40 Perda/ Pergub	107,5%
		2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	528 Perda/ Perkada	450 Perda/ Perkada	117,3%
		3. Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	909 produk hukum	700 produk hukum	129,8%
		4. Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	43 produk hukum	40 produk hukum	107,5%
2.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	5. Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	38 perkara	25 perkara	152%
		6. Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	23 kasus	15 kasus	153,3%

Uraian penjelasan tabel :

Kemajuan Capaian Strategis pada Biro Hukum Setdaprovsu pada sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah dan Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan

Masyarakat dapat mencapai target akhir rencana strategis, sedangkan pada sasaran strategis.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/
Provinsi/ Kabupaten/Kota**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain	% Capaian
1.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	43 Perda/ Pergub	Tidak ada	Tidak ada
		2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	528 Perda/ Perkada	Tidak ada	Tidak ada
		3. Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	909 produk hukum	Tidak ada	Tidak ada
		4. Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	43 produk hukum	Tidak ada	Tidak ada
2.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	5. Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	38 perkara	Tidak ada	Tidak ada
		6. Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	23 kasus	Tidak ada	Tidak ada

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	43 Perda/ Pergub	Tidak ada	Tidak ada
		2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	528 Perda/ Perkada	Tidak ada	Tidak ada
		3. Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.	909 produk hukum	Tidak ada	Tidak ada
		4. Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	43 produk hukum	Tidak ada	Tidak ada
2.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprovsu dan Masyarakat.	5. Jumlah Penanganan Perkara Pemprovsu di Pengadilan.	38 perkara	Tidak ada	Tidak ada
		6. Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	23 kasus	Tidak ada	Tidak ada

Secara umum permasalahan yang dihadapi Biro Hukum setdaprovsu dalam melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan antara lain:

1. Terhadap Ranperda yang dievaluasi ada batas waktu yang ditetapkan oleh Permendagri No. 80 Tahun 2015, hal ini dikarenakan Ranperda tersebut harus dikonsultasikan ke Kementerian terkait.
2. Perangkat dinas terkait dalam membalas permohonan saran pendapat terhadap Ranperda yang dievaluasi masih belum mematuhi adanya batas waktu yang ditentukan, sehingga belum menjadi prioritas.

Untuk mengantisipasi dan mengatasi kendala pelaksanaan program dan kegiatan diperlukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengefektifkan waktu pembahasan agar lebih baik lagi.
- Disarankan agar kementerian melakukan evaluasi secara online sehingga mempercepat proses evaluasi.
- Melakukan rapat koordinasi kepada perangkat dinas terkait.

3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan terhadap kinerja yang sudah efektif atau ketercapaian 100%. Analisis efisiensi yang hanya membandingkan antara output dan input belum menunjukkan efisiensi yang sesungguhnya, pengukuran efisiensi sesungguhnya adalah dengan membandingkan kembali hasil perbandingan output dan input dengan standar efisiensi.

Tabel 3.6

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Target	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi.	40 Perda/ Pergub	43 Perda/ Pergub	100 %	107,5 %	100,00	0,00
		2. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi.	450 Perda/ Perkada	528 Perda/ Perkada	100 %	117,3 %	100,00	0,00
		3. Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama,	700 produk hukum	909 produk hukum	100 %	129,8 %	100,00	0,00

		Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi.						
		4. Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu.	40 produk hukum	43 produk hukum	100 %	107,5 %	100,00	0,00
2.	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan Pemprov dan Masyarakat.	5. Jumlah Penanganan Perkara Pemprov di Pengadilan.	25 perkara	38 perkara	100 %	152,0 %	100,00	0,00
		6. Jumlah Tindak Lanjut Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.	15 kasus	23 kasus	100 %	153,3 %	100,00	0,00

- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang dieksaminasi, dengan persentase capaian kinerja 107,5% anggaran sebesar Rp. 320.867.250 terealisasi sebesar Rp. 308.765.567, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 96,23%.
- Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota yang dievaluasi dan difasilitasi, dengan persentase capaian kinerja 117,3 %, anggaran sebesar Rp 347.590.000 terealisasi sebesar Rp. 347.590.000, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%.
- Jumlah Rancangan Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Naskah Hukum Lainnya yang dieksaminasi, dengan persentase capaian kinerja 129,8 %, anggaran sebesar Rp. 28.100.000 terealisasi sebesar Rp. 28.100.000, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%.
- Jumlah Produk hukum daerah Provinsi Sumatera Utara yang dipublikasikan dan diinformasikan kepada masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Setdaprovsu,

dengan persentase capaian kinerja 107,5%, anggaran sebesar Rp 258.927.501 terealisasi sebesar Rp. 258.927.501, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

- Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan, dengan persentase capaian kinerja 152,0%, anggaran sebesar Rp. 551.866.900, terealisasi sebesar Rp. 551.866.900, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%.
- Jumlah Penanganan Perlindungan HAM dan Masalah Non Litigasi, dengan persentase capaian kinerja 153,3%, anggaran sebesar Rp. 531.421.900, terealisasi sebesar Rp. 531.421.900, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100%.

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau pun Kegagalan

Bahwa secara keseluruhan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja telah tercapai, yang mengindikasikan bahwa kegiatan yang dilakukan telah mencapai kesesuaian terhadap kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan penatausahaan SKPD	15 dokumen	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	55 orang	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi	220 orang	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos, Makan dan Minum Rapat Kantor	48 paket	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Penggandaan/Fotocopy	210000 paket	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	0	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan	100 laporan	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Pengiriman surat/paket	550 laporan	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	26 unit	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kantor Biro Hukum	6 orang	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Biro Hukum yang diperbaiki	110 unit	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM				
1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan		100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Draft Ranperda yang dibahas (dalam & di luar Propemperda), Jumlah Kelompok Kerja Hukum/Legal Drafting, Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun.	80 dokumen	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun	750 dokumen	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Kompilasi Lembaran Daerah dan Berita Daerah yang disusun, Jumlah Sistem Jaringan dokumentasi & Informasi Kab/Kota yang terintegrasi	20 dokumen	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi	600 dokumen	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
2	Fasilitasi Bantuan Hukum		100%	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Bantuan Hukum yang diberikan & Jumlah Penanganan Perkara yang difasilitasi	35 kasus	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai
	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Fasilitasi Dokumen RANHAM & Jumlah Penanganan Masalah Non Litigasi yang difasilitasi	40 kasus	Menunjang	Target Program/Kegiatan Telah Tercapai

3.2 Realisasi Anggaran

Besaran anggaran yang digunakan untuk program yang berkaitan langsung dengan sasaran dan indikator kinerja utama Biro Hukum Setdaprovsu, yakni: Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum, dengan anggaran sebesar Rp. 2.907.876.119 dan realisasi sebesar Rp. 2.877.477.847,- (sebanyak 2 kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2024), rincian kegiatan:

- a. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 955.484.751,- dan realisasi sebesar Rp. 943.383.068,- terdiri dari 4 (empat) Sub. Kegiatan, yaitu:
 - 1) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan, anggaran sebesar Rp. 320.867.250,- dan realisasi sebesar Rp. 308.765.567,-
 - 2) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan, anggaran sebesar Rp. 28.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 28.100.000,-
 - 3) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya, anggaran sebesar Rp. 258.927.501 dan realisasi sebesar Rp. 258.927.501,-
 - 4) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 347.590.000,- dan realisasi sebesar Rp. 347.590.000,-

b. Kegiatan Fasilitas Bantuan Hukum, anggaran sebesar Rp. 1.083.288.800,- dan realisasi sebesar Rp. 1.083.288.800,- terdiri dari 2 (dua) Sub. Kegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum, anggaran sebesar Rp. 551.866.900,- dan realisasi sebesar Rp. 551.866.900,-
- 2) Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM, anggaran sebesar Rp. 531.421.900,- dan realisasi sebesar Rp. 531.421.900,-

Program dan Kegiatan Biro Hukum Setdaprovsu Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.907.876.119,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.877.477.847,- atau sebesar 98,95%, dan sisa anggaran adalah sebesar Rp. 30.398.272,-.

Secara lengkap, perbandingan pencapaian target kinerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 dengan pencapaian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja Biro Hukum Setdaprovsu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	869.102.568	850.805.979	97,89
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	115.650.000	110.650.000	95,68
1.1.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	115.650.000	110.650.000	95,68
1.1.1.1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	114.600.000	109.600.000	95,64
1.1.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.050.000	1.050.000	100,00
1.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.382.000	38.197.610	96,99
1.2.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	26.182.000	25.447.610	97,20
1.2.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	0,00
1.2.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0,00
1.2.1.3	Belanja Registrasi/Keanggotaan	0	0	0,00
1.2.1.4	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	0,00
1.2.1.5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26.182.000	25.447.610	97,20
1.2.2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	13.200.000	12.750.000	96,59
1.2.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	0,00
1.2.2.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	0	0	0,00
1.2.2.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000	6.250.000	96,15
1.2.2.4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.700.000	6.500.000	97,01
1.2.2.5	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	0	0,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.166.468	522.754.269	98,79
1.3.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	153.913.468	153.526.131	99,75
1.3.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	84.639.468	84.262.131	99,55
1.3.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.010.000	2.000.000	99,50
1.3.1.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	50.264.000	50.264.000	100,00
1.3.1.4	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	17.000.000	17.000.000	100,00
1.3.2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.265.000	10.264.600	100,00
1.3.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	10.265.000	10.264.600	100,00
1.3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.988.000	358.963.538	98,35
1.3.3.1	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.000.000	9.750.000	97,50
1.3.3.2	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	354.988.000	349.213.538	98,37
1.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.904.100	171.204.100	96,78
1.4.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.526.500	95.000	6,22
1.4.1.1	Belanja Paket/Pengiriman	1.526.500	95.000	6,22
1.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00
1.4.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0	0	0,00
1.4.2.2	Belanja Modal Personal Computer	0	0	0,00
1.4.2.3	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0	0	0,00
1.4.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	175.377.600	171.109.100	97,57
1.4.3.1	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	168.000.000	164.500.000	97,92
1.4.3.2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.855.600	6.141.475	89,58
1.4.3.3	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	522.000	467.625	89,58
1.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.000.000	8.000.000	100,00
1.5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	8.000.000	100,00
1.5.1.1	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	8.000.000	8.000.000	100,00
2	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	2.038.773.551	2.026.671.868	99,41
2.1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	955.484.751	943.383.068	98,73
2.1.1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	320.867.250	308.765.567	96,23
2.1.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.442.250	3.442.250	100,00
2.1.1.2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0,00
2.1.1.3	Belanja Jasa Tenaga Ahli	48.000.000	36.000.000	75,00
2.1.1.4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	269.425.000	269.323.317	99,96
2.1.2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	28.100.000	28.100.000	100,00
2.1.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	6.050.000	6.050.000	100,00
2.1.2.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.590.000	8.590.000	100,00
2.1.2.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.060.000	8.060.000	100,00
2.1.2.4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.400.000	5.400.000	100,00
2.1.3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	258.927.501	258.927.501	100,00
2.1.3.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	19.845.000	19.845.000	100,00
2.1.3.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	8.851.200	8.851.200	100,00
2.1.3.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	18.730.000	18.730.000	100,00
2.1.3.4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	12.200.000	12.200.000	100,00
2.1.3.5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	856.900	856.900	100,00
2.1.3.6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.565.801	1.565.801	100,00
2.1.3.7	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	45.500.000	45.500.000	100,00
2.1.3.8	Belanja Jasa Tenaga Ahli	58.500.000	58.500.000	100,00

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
2.1.3.9	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	0	0	0,00
2.1.3.10	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	0	0	0,00
2.1.3.11	Belanja Paket/Pengiriman	0	0	0,00
2.1.3.12	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.605.100	3.605.100	100,00
2.1.3.13	Belanja Iuran Jaminan Kematian Kerja bagi Non ASN	274.500	274.500	100,00
2.1.3.14	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64.733.000	64.733.000	100,00
2.1.3.15	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000	23.400.000	100,00
2.1.3.16	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	866.000	866.000	100,00
2.1.4	Fasilitas dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	347.590.000	347.590.000	100,00
2.1.4.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.630.000	3.630.000	100,00
2.1.4.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	5.200.000	5.200.000	100,00
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.590.000	7.590.000	100,00
2.1.4.3	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	15.600.000	15.600.000	100,00
2.1.4.4	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	315.570.000	315.570.000	100,00
2.2	Fasilitas Bantuan Hukum	1.083.288.800	1.083.288.800	100,00
2.2.1	Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	551.866.900	551.866.900	100,00
2.2.1.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	0	0	0,00
2.2.1.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.619.900	6.619.900	100,00
2.2.1.3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.000.000	3.000.000	100,00
2.2.1.4	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	0	0	0,00
2.2.1.5	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	0	0	0,00
2.2.1.6	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0	0	0,00
2.2.1.7	Belanja Jasa Tenaga Ahli	144.000.000	144.000.000	100,00
2.2.1.8	Belanja Registrasi/Keanggotaan	8.000.000	8.000.000	100,00
2.2.1.9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	390.247.000	390.247.000	100,00
2.2.2	Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	531.421.900	531.421.900	100,00
2.2.2.1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.800.000	8.800.000	100,00
2.2.2.2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	13.346.900	13.346.900	100,00
2.2.2.3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42.736.000	42.736.000	100,00
2.2.2.4	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	33.300.000	33.300.000	100,00
2.2.2.5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	141.250.000	141.250.000	100,00
2.2.2.6	Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain	0	0	0,00
2.2.2.7	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	0,00
2.2.2.8	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0	0	0,00
2.2.2.9	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	291.989.000	291.989.000	100,00
	TOTAL	2.907.876.119	2.877.477.847	98,95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 yang telah disusun Biro Hukum Setdaprovsu menunjukkan pencapaian kinerja yang dibangun atas jerih payah seluruh pegawai Biro Hukum Setdaprovsu dan kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini dapat dilihat dari terwujudnya semua sasaran strategis Biro Hukum Setdaprovsu yang dicapai melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berangkat dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023, Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk laporan kepada pemberi delegasi, wewenang, seperti lazimnya penerapan bentuk-bentuk sistem baru, diperlukan persiapan sumber daya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, oleh karena itu Laporan Kinerja ini dipandang sebagai bentuk pemenuhan penilaian tampilan organisasi.

Akan sangat wajar apabila Laporan Kinerja ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu sikap adaptif dan responsif diberikan terhadap segala bentuk, saran dan perbaikannya.

B. Saran

Obyektifitas informasi dan dari penetapan indikator kinerja dan penyajian angka-angka untuk pencapaian kinerja dari konsepsi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Transisi Provsu Tahun 2019-2023 yang dilatarbelakangi dari komitmen yang dibangun dari segala potensi yang ada, oleh karena itu validitas data untuk diolah menjadi informasi sangat tergantung dari sistem yang ada serta konsistensi dari komitmen yang telah dibangun bersama.

Dengan penetapan indikator sampai dengan output masih berorientasi pada proses, dan diharapkan untuk Laporan Kinerja berikutnya sudah menunjukkan orientasi hasil melalui penyempurnaan sistem informasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa evaluasi penyerapan anggaran Biro Hukum dapat memenuhi kriteria baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024 ini disusun. Dengan adanya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembenahan kinerja Biro Hukum Setdaprovsu di masa yang akan datang dalam mewujudkan visi, misi, tujuan serta sasarannya.

Medan, Maret 2025

Kepala Biro Hukum Setdaprovsu,



APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196904211990032003

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DWI ARIES SUDARTO. S.H., M.H
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. BASARIN YUNUS TANJUNG, M.Si
Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DA KESEJAHTERAAN RAKYAT
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2024

Pihak Kedua,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAPROVSU,

Drs. BASARIN YUNUS TANJUNG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196905281990101001

Pihak Kesatu,

KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU,

DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197104131996031002

**LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Biro Hukum SetdaprovSU
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	1 Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu.	1190 produk hukum
		2 Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan.	40 produk hukum
2	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan PemprovSU dan Masyarakat.	1 Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan.	25 perkara
		2 Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM.	15 kasus/masalah

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Rp 2.079.111.813	APBD
2	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Rp 3.705.192.901	APBD
TOTAL		Rp 5.784.304.714	

Medan, 2024

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJATERAAN RAKYAT SETDAPROVSU



Drs. BASARIN YUNUS TANJUNG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196905281990101001

KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU,



DWI ARIES SUDARTO, S.H., M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 197104131996031002



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H
Jabatan : Plt. KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. BASARIN YUNUS TANJUNG, M.Si
Jabatan : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAPROVSU

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu pada tahun ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perubahan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 2024

Pihak Kedua,

Pihak Kesatu,

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDAPROVSU,

Plt. KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU,


Drs. BASARIN YUNUS TANJUNG, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196905281990101001


APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196904211990032003

LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Biro Hukum SetdaprovSU
Tahun : 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatkan Pelayanan Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Daerah.	Jumlah Penyelesaian Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tepat Waktu	1190 produk hukum
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang diinformasikan	40 produk hukum
2	Meningkatkan Pelayanan Hukum dan Perlindungan HAM dalam Menangani Permasalahan Hukum di Lingkungan PemrovSU dan Masyarakat.	Jumlah Penanganan Perkara Hukum di Pengadilan	25 perkara
		Jumlah Penanganan Sengketa di Luar Pengadilan dan Perlindungan HAM.	15 kasus/masalah

Program	Anggaran	Keterangan
I Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Rp 2.038.773.551	P. APBD
TOTAL	Rp 2.038.773.551	

Medan, 2024

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDAPROVSU,

Drs. BASARIN YUNUS TANJUNG, M.SI.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196905281990101001

Pit. KEPALA BIRO HUKUM SETDAPROVSU,

APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 196904211990032003